

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk memberikan arah dan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Tahun 2012-2016. Perwujudan Renstra di setiap tahun adalah Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja (Renja) sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam APBD Kabupaten Blitar. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus diukur, dievaluasi dan dilaporkan capaian kinerjanya yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan, yang berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati yang diukur dengan menggunakan kinerja dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

1.2 GAMBARAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

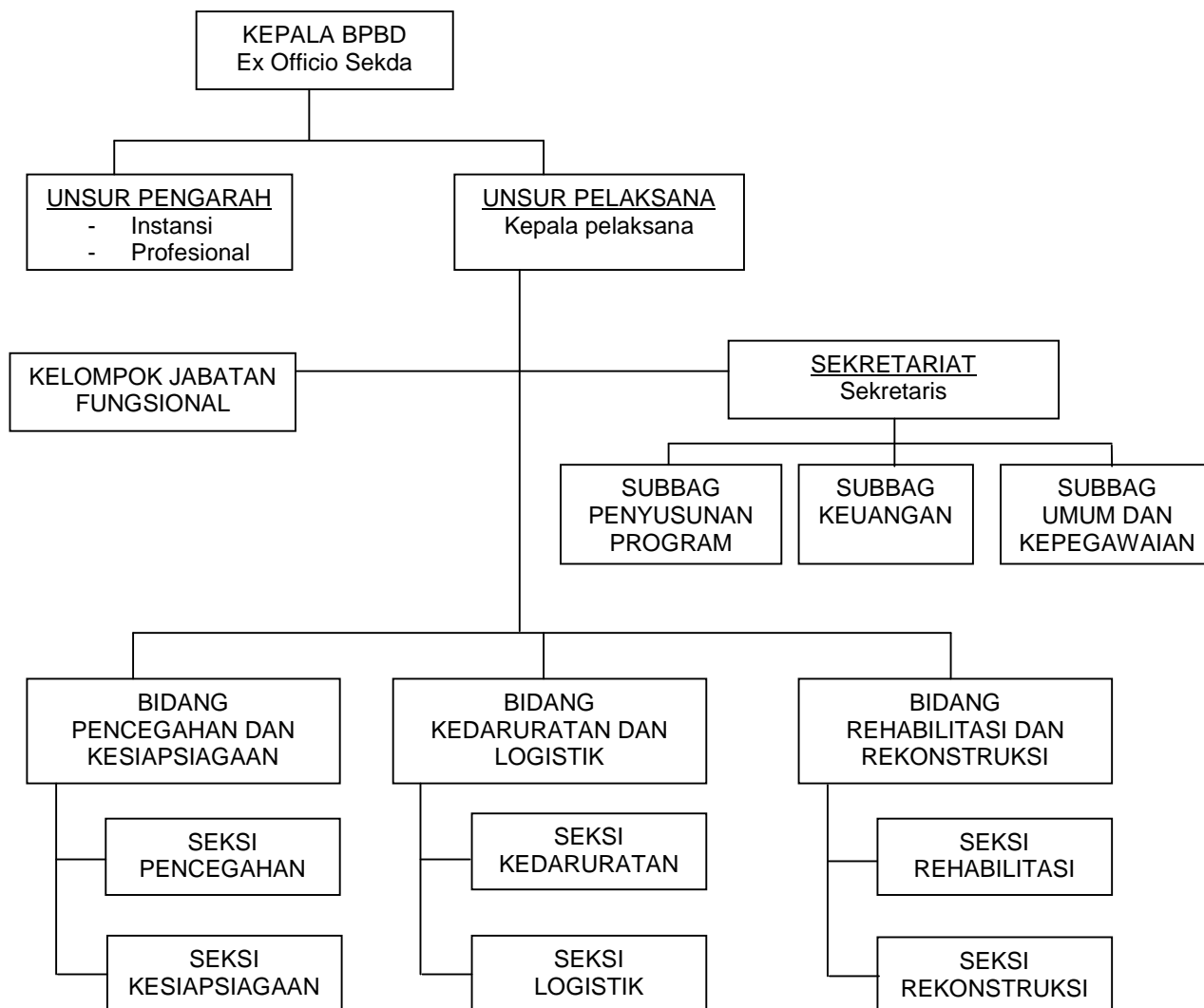
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Blitar. BPBD Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar. BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Blitar. BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara rangkap (*ex-officio*) dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, BPBD mempunyai tugas antara lain:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan dan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Blitar;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut BPBD menjalankan fungsi pelaksanaan, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana. Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Pelaksana BPBD, susunan organisasi BPBD terdiri dari Kepala Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, sedangkan Bidang, Seksi dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dddiii bawah dan berrrtannnggungjawab kepada Kepala Pelaksana secara berjenjang. Sekretariat membawahi Sub Bagian Penyusunan Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi Seksi Pencegahan dan Seksi Kesiapsiagaan. Bidang Kedaruratan membawahi Seksi Kedaruratan dan Seksi Logistik. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi Seksi Rehabilitasi dan Seksi Rekonstruksi. Adapun struktur organisasi BPBD dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Perbup Nomor 6 Tahun 2011)

Kabupaten Blitar memiliki risiko bencana yang tinggi. Ancaman bencana yang ada di Kabupaten Blitar antara lain erupsi Gunungapi Kelud, banjir lahar hujan, banjir genangan, banjir bandang, longsor, angin kencang, angin puting beliung, gempabumi, tsunami, gelombang tinggi dan abrasi, kekeringan dan kegagalan teknologi berupa jebolnya waduk Wlingi Raya dan waduk Serut. Di sisi lain jumlah penduduk yang tinggal di lokasi rawan bencana cukup tinggi, hal ini menyebabkan tingkat kerentanan menjadi tinggi. Multiancamannya yang tinggi apabila bertemu dengan kerentanan yang tinggi akan menghasilkan risiko bencana yang tinggi apabila tidak diimbangi dengan kapasitas masyarakat yang tinggi. Agar risiko bencana dapat diminimalisasi maka peningkatan kapasitas inilah yang menjadi tugas BPBD.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai akhir tahun 2016 didukung oleh 20 orang PNS dan 21 orang

tenaga Non PNS. Adapun sumberdaya manusia yang ada di BPBD berdasarkan pangkat/golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Pegawai PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Tingkat Pendidikan

NO.	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN					
		S2	S1	AKADEMI	SMA	SMP	SD
1.	Pembina Utama Muda/ IV-c	1					
2.	Pembina/ IV-a	4	1				
3.	Penata Tingkat I/ III-d		6				
4.	Penata/ III-c		2				
5.	Penata Muda Tingkat I/ III-b		1				
6.	Pengatur Tingkat I/ II-d			2			
7.	Pengatur/ II-c			2			
8.	Pengatur Muda Tingkat I II-b						
9.	Pengatur Muda/ II-a						
10.	Juru Tingkat I/ I-d					1	
Jumlah		5	10	4		1	

Sumber: BPBD Kabupaten Blitar, 2016

Dalam kurun waktu lima tahun terbentuknya BPBD, berbagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan upaya pengurangan risiko bencana telah dilakukan. Serangkaian upaya tersebut tentu membutuhkan proses dan kerjasama antarpemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana. Selama berproses dalam penanggulangan bencana, BPBD mengalami beberapa permasalahan utama yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Permasalahan utama (*strategic issue*) tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya tenaga posko yang terlatih;
2. Kurangnya jumlah staf di masing-masing bidang;
3. Tingkat risiko bencana yang tinggi membutuhkan koordinasi yang intensif dengan masyarakat, lembaga, usaha, dan instansi terkait;
4. Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Blitar belum di sah kan; dan
5. Belum adanya rencana induk kabupaten yang membahas mengenai pembagian tugas dan peran SKPD dalam penanggulangan bencana yang dituangkan dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Blitar.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS BPBD TAHUN 2016-2021

2.1.1 VISI

Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar Terpilih yaitu "Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing". Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah maka BPBD memiliki visi yang mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tersebut.

2.1.2 MISI

Visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar diterjemahkan kedalam enam misi. Misi tersebut antara lain sebagai berikut: 1) Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat; 2) Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal, dan hukum; 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia; 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; 5) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing; dan 6) Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan.

BPBD sebagai salah satu SKPD yang mendukung tercapainya visi misi Bupati mengacu pada misi kedua yaitu "Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum". Sasaran dari misi kedua tersebut adalah "Terwujudnya stabilitas wilayah", dan dijabarkan kedalam tiga strategi. BPBD masuk dalam strategi ketiga yang berbunyi "Meningkatkan mitigasi bencana" dengan arah kebijakan meningkatkan kewaspadaan masyarakat pada daerah rawan bencana.

2.1.3 TUJUAN STRATEGIS

Dalam mewujudkan pencapaian visi yang telah dirumuskan tersebut, maka implementasinya dijabarkan dalam tujuan strategis yang ingin dicapai. Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan masyarakat pada daerah rawan bencana tujuan strategis BPBD sebagai berikut.

- 1) Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko bencana serta penanganan bencana;

- 2) Pembentukan Tim Reaksi Cepat (Unit Khusus Penanganan Bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai;
- 3) Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan, koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana, pendukung serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien; dan
- 4) Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih dari pada sebelum bencana melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi peningkatan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

2.1.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk mewujudkan tujuan strategis organisasi, maka ditetapkan sasaran dengan fokus utama berupa target yang tercantum pada Indikator Kerja Utama (IKU) Kabupaten Blitar serta IKU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar. Indikator kinerja utama dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Blitar

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko bencana serta penanganan bencana	1. Prosentase lokasi rawan bencana yang telah dipasang rambu-rambu
		2. Jumlah lokasi rawan bencana
2.	Pembentukan Tim Reaksi Cepat (Unit Khusus Penanganan Bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai	Jumlah Tim Reaksi Cepat
3.	Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan, koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana, pendukung serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	1. Prosentase korban bencana yang dapat tertangani pada masa tanggap darurat
		2. Jumlah bantuan logistik bagi korban bencana
4.	Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih dari pada sebelum bencana melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi peningkatan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan	Prosentase sarana prasarana yang terbangun kembali pascabencana

Sumber: BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2016

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan janji untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kepala SKPD. Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target BPBD Kabupaten Blitar tahun 2016 dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Sasaran Strategis, Indikator dan Target Tahun 2016

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Penguatan kapasitas aparaturn pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko bencana serta penanganan bencana	1. Prosentase lokasi rawan bencana yang telah dipasang rambu-rambu	15%
		2. Jumlah lokasi rawan bencana	22 kecamatan
2.	Pembentukan Tim Reaksi Cepat (Unit Khusus Penanganan Bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai	Jumlah Tim Reaksi Cepat	1 tim
3.	Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan, koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana, pendukung serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	1. Prosentase korban bencana yang dapat tertangani pada masa tanggap darurat	100%
		2. Jumlah bantuan logistik bagi korban bencana	170 paket
4.	Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih dari pada sebelum bencana melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi peningkatan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan	Prosentase sarana prasarana yang terbangun kembali pascabencana	6%

Sumber: BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2016

Dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016, BPBD mendapatkan anggaran sebesar Rp. 17.999.587.000,00 (Tujuhbelas Milyar Sembilanratus Sembilanpuluh Sembilan Juta Limaratus Delapanpuluh Tujuh Ribu Rupiah). Pagu anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program seperti pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Program dan Anggaran BPBD Kabupaten Blitar Tahun 2016

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 909.060.500,00	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Rp. 1.231.155.000,00	APBD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rp. 30.250.000,00	APBD
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 25.000.000,00	APBD
5.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp. 1.295.700.500,00	APBD
6.	Program Kedaruratan dan Logistik	Rp. 635.000.000,00	APBD
7.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp. 50.150.000	APBD
8.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Rp. 13.823.271.500,00	APBD
Jumlah Total Anggaran		Rp. 17.999.587.000,00	APBD

Sumber: BPBD Kabupaten Blitar, Pebruari 2016

2.3 PERUBAHAN ANGGARAN DAN KEGIATAN

Seiring dengan berjalannya waktu, beberapa kegiatan dan program yang telah direncanakan oleh BPBD tidak terlaksana karena beberapa hal. Kondisi tersebut menyebabkan pergeseran anggaran dari kegiatan yang tidak terlaksana ke kegiatan lain yang harus segera dilaksanakan. Adapun perubahan Sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan perubahan anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Perubahan Sasaran Strategis, Indikator dan Target Tahun 2016

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	PERUBAHAN TARGET
1.	Penguatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko bencana serta penanganan bencana	1. Prosentase lokasi rawan bencana yang telah dipasang rambu-rambu	15%	0%
		2. Jumlah lokasi rawan bencana	22 kecamatan	22 kecamatan
2.	Pembentukan Tim Reaksi Cepat (Unit Khusus Penanganan Bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai	Jumlah Tim Reaksi Cepat	1 tim	1 tim
3.	Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan, koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana, pendukung serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	1. Prosentase korban bencana yang dapat tertangani pada masa tanggap darurat	100%	100%
		2. Jumlah bantuan logistik bagi korban bencana	170 paket	170 paket
4.	Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih dari pada sebelum bencana melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi peningkatan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan	Prosentase sarana prasarana yang terbangun kembali pascabencana	6%	8%

Sumber: BPBD Kabupaten Blitar, Oktober 2016

Adanya perubahan target capaian pada dua indikator menyebabkan perubahan anggaran kegiatan. Setelah dilakukan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) di bulan Oktober 2016, pagu anggaran BPBD menjadi Rp. 19.398.762.000,00 (Sembilanbelas Milyar Tigaratus Sembilanpuluh Delapan Juta Tujuhratus Enampuluh Dua Ribu Rupiah). Hal ini berarti pagu anggaran BPBD bertambah sebesar Rp. 1.399.175.000,00 (Satu Milyar Tigaratus Sembilanpuluh Sembilan Juta Seratus Tujuhpuluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 7,7 % dari pagu anggaran awal. Adapun perincian anggaran setelah PAK dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Perubahan Anggaran BPBD Kabupaten Blitar Setelah PAK Tahun 2016

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 889.060.500,00	APBDP
2.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Rp. 702.034.500,00	APBDP
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rp. 0	APBDP
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 25.000.000,00	APBDP
5.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp. 2.493.148.000,00	APBDP
6.	Program Kedaruratan dan Logistik	Rp. 670.200.000,00	APBDP
7.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp. 30.150.000,00	APBDP
8.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Rp. 14.589.169.000,00	APBDP
Jumlah Total Anggaran		Rp. 19.398.762.000,00	APBDP

Sumber: BPBD Kabupaten Blitar, Oktober 2016

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar telah dapat melaksanakan tugas, pokok, fungsinya sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut pada tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar memiliki capaian sebagai berikut.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2016

Membandingkan target dengan realisasi kinerja tahun 2016 bertujuan untuk mengetahui apakah sasaran strategis yang ditetapkan tercapai atau tidak. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2016

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Prosentase lokasi rawan bencana yang telah dipasang rambu-rambu	0%	0%	0%
2.	Jumlah lokasi rawan bencana	22 kec	22 kec	100%
3.	Jumlah Tim Reaksi Cepat	1 tim	1 tim	100%
4.	Prosentase korban bencana yang dapat tertangani pada masa tanggap darurat	100%	100%	100%
5.	Jumlah bantuan logistik bagi korban bencana	170 paket	159 paket	93,5%
6.	Prosentase sarana prasarana yang terbangun kembali pascabencana	8%	118,18%	147,7%

Sumber : BPBD Kabupaten Blitar, 2016

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dievaluasi bahwa indikator kinerja yang belum tercapai adalah pada indikator ke 5 yaitu jumlah bantuan logistik bagi korban bencana. Ditargetkan 170 paket bantuan dapat disalurkan kepada korban bencana, namun yang tersalurkan hanya 159 paket. Hal ini disebabkan karena kejadian bencana tidak dapat diprediksikan sebelumnya. Begitupun dengan jumlah korban bencananya, sehingga penerima bantuan bencana tidak dapat tepat sesuai dengan yang ditargetkan.

3.1.2 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2016 DENGAN TAHUN LALU

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015 digunakan untuk mengetahui adanya peningkatan atau penurunan realisasi kinerja antar tahun. Berikut disajikan perbandingannya pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015

NO	URAIAN IKU	REALISASI 2015	REALISASI 2016
1.	Prosentase rawan bencana yang telah dipasang rambu-rambu	27 %	0
2.	Jumlah lokasi rawan bencana	22 Kec	22 Kec
3.	Jumlah tim reaksi cepat	1 Tim	1 Tim
4.	Prosentase korban bencana yang dapat tertangani pada masa tanggap darurat	100 %	100 %
5.	Jumlah bantuan logistik bagi korban bencana	145 Paket	159 Paket
6.	Prosentase sarana dan prasarana yang terbangun kembali pascabencana	3%	118,18%

Sumber: BPBD Kabupaten Blitar, 2016

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dievaluasi capaian kinerja indikator utama sebagai berikut:

- a. Capaian IKU yang mengalami penurunan: pada tahun 2016 pemasangan rambu-rambu di daerah rawan bencana tidak terealisasi sama sekali, sehingga prosentase pemasangan rambu di daerah rawan bencana adalah 0%. Hal ini terjadi karena adanya pergeseran anggaran yang diperlukan untuk kegiatan penanganan darurat bencana yang dianggap lebih mendesak.
- b. Capaian IKU yang mengalami peningkatan: pada tahun 2016 jumlah bantuan logistik bagi korban bencana mengalami peningkatan sebesar 14 paket atau sebesar 9,6%.
- c. Perbedaan IKU tahun 2015 dengan 2016: pada tahun 2015 terdapat satu perbedaan indikator kinerja utama yaitu jumlah desa tangguh dalam menghadapi bencana. Tahun 2016 indikator kinerja tersebut tidak ada.

3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2016 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis BPBD dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan jangka menengah SKPD. Perbandingan keduanya disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra BPBD

NO.	URAIAN IKU	TARGET AKHIR RENSTRA (2016)	REALISASI 2016
1.	Prosentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%
2.	Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi layak fungsi	100%	100%
3.	Prosentase lokasi rawan bencana yang telah terpasang rambu-rambu	0%	0%
4.	Jumlah lokasi rawan bencana	22 kecamatan	0%
5.	Jumlah Tim Reaksi Cepat	1 tim	1 tim
6.	Prosentase korban bencana yang dapat tertangani pada masa tanggap darurat	100%	100%
7.	Jumlah bantuan logistik bagi korban bencana	170 paket	170 paket
8.	Prosentase sarana prasarana yang terbangun kembali pascabencana	8%	118,18%

Sumber: BPBD Kabupaten Blitar, 2016

3.1.4 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA ATAS ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2016 tidak terdapat kendala yang berarti dalam pencapaian target kinerja. Target kinerja yang belum tercapai 100% adalah penyaluran bantuan korban bencana yang baru mencapai 93,5%. Kejadian bencana tidak dapat

ditargetkan, karena kejadian bencana terjadi diluar perencanaan manusia. Sehingga jumlah bantuan yang diberikan kepada korban juga tidak dapat secara tepat ditargetkan.

Indikator kinerja yang belum tercapai pada tahun 2016 adalah pemasangan rambu-rambu di daerah rawan bencana. Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena pada tahun 2016 terjadi peningkatan intensitas bencana yang terjadi. Salah satunya adalah Banjir Sutojayan yang terjadi pada awal tahun 2016. Peningkatan intensitas bencana yang terjadi menyebabkan peningkatan anggaran yang dibutuhkan untuk operasional kedarurata. Secara lebih jauh, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksipun juga ikut meningkat. Sehingga anggaran pemasangan rambu-rambu di daerah rawan bencana digeser ke anggaran operasional kedaruratan dan rehabilitasi dan rekonsruksi.

3.1.5 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan dengan membandingkan antara hasil capaian kinerja dengan anggaran yang diserap. Tahun 2016 BPBD mendapatkan pagu anggaran Rp.19.398.762.000,00 untuk melaksanakan 7 program kerjanya. Dari pagu anggaran tersebut terealisasi Rp. 18.394.685.482 dengan prosentase penyerapan 94,82 %.

3.1.6 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU PUN KEGAGALAN YANG MENUNJANG PERNYATAAN KINERJA

Secara umum program/kegiatan BPBD tahun 2016 menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama. Terbukti tingkat penyerapan anggaran seluruh program/kegiatan mencapai 94,82%. Indikator kinerja utama yang mencapai capaian 100% atau lebih antara lain:

1. Prosentase kecukupan administrasi perkantoran;
2. Prosentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi layak fungsi;
3. Prosentase korban bencana yang dapat tertangani pada masa tanggap darurat;
4. Jumlah bantuan logistic bagi korban bencana; dan
5. Prosentase sarana prasarana yang terbangun kembali pascabencana.

Diantara capaian di kelima indikator kinerja utama tersebut, indikator kinerja yang mencapai lebih dari 100% adalah prosentase sarana prasarana yang terbangun kembali pascabencana, yaitu 118,18%. Hal ini terjadi karena pada

tahun 2016 BPBD memperoleh dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dari Pemerintah untuk pembangunan 3 buah sabo dam yang rusak pascaerupsi Gunungapi Kelud tahun 2014.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pencapaian sasaran strategis kinerja BPBD tahun 2016 dituangkan dalam tujuh (7) program yang dijabarkan menjadi beberapa kegiatan. Program kerja BPBD tahun anggaran 2016 antara lain: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantora; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur; 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 5) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana; 6) Program Kedaruratan dan Logistik; dan 7) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Tahun 2016 BPBD mendapatkan pagu anggaran Rp.19.398.762.000,00 untuk melaksanakan 7 program kerjanya. Dari pagu anggaran tersebut terealisasi Rp. 18.394.685.482 dengan prosentase penyerapan 94,82 %. Selain pagu anggaran dari daerah, pada tahun 2016 BPBD mendapatkan bantuan hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Rp. 10.107.387.000 dari BNPB. Bantuan hibah tersebut terealisasi Rp. 9.991.570.500,00 atau sebesar 98,85%. Bantuan hibah ini dilaksanakan selama 12 bulan sejak dana diterima di kas umum daerah pada tanggal 24 November 2016, digunakan untuk pembangunan sabo dam Kali Kebo, sabo dam Kali Jari I dan sabo dam Kali Jari II. Adapun rincian realisasi anggaran tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran BPBD Tahun 2016

No	Program/Kegiatan	Alokasi Biaya			Keluaran (Ouput)		
		Anggaran	Realisasi	Capaian %	Uraian	Target	Realisasi
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran						
	Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran	889.060.500	736.207.882	82.81	Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran dapat berjalan baik dan lancar	12 bln	100 %
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur						
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	702.034.500	670.176.750	95.46	Terlaksananya sarana aparatur	12 bln	100 %
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur						
	Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur	-	-	-	-	-	-

No	Program/Kegiatan	Alokasi Biaya			Keluaran (Ouput)		
		Anggaran	Realisasi	Capaian %	Uraian	Target	Realisasi
	dalam penanggulangan bencana						
4	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						
	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	5.975.000	23.90	Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10 lap	100 %
5	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam						
	Pengenalan potensi bencana bagi anak sekolah di wilayah potensi bencana	89.700.000	79.430.000	88.55	Jumlah peserta yang mengikuti pengenalan potensi bencana	200 anak	100 %
	Kajian pengurangan resiko bencana kekeringan kec.l panggungrejo dan wonotirto	200.000.000	199.260.000	99.63	Jumlah dokumen	1 dok	100 %
	Penyusunan dokumen rencana kontijensi anjur sutojayan	150.000.000	149.310.000	99.54	Jumlah dokumen	1 dok	100 %
	Sosialisasi pengurangan resiko bencana	56.000.000	41.870.000	74.77	Jumlah yang mengikuti sosialisasi	100 org	100 %
	Pembangunan sarana pengurangan resiko bencana	1899448000	1.853.768.000	97.60	Pengurangan resiko bencana	11 titik	7 titik
	Pemasangan rambu rambu peringatan longsor	-	-	-	-	-	-
	Pengenal dasara manajemen bencana	98.000.000	79.605.000	81.23	Jumlah peserta	200 org	100 %
6	Program kedaruratan dan logistik						
	Pelatihan water rescue	50.000.000	48.565.000	97.13	Jumlah peserta	60 org	100 %
	Pengadaan logistik	125.000.000	30.880.050	24.70	Jumlah logistic	12 bln	100 %
	Operasional kedaruratan	85.200.000	84.990.000	99.75	Jumlah operasional	12 bln	100 %
	Bantuan material penanganan darurat bencana	410.000.000	325866300	79,68	Jumlah bantuan material		
7	Program Rehabilitasi dan rekonstruksi						
	Rekonstruksi sarana prasana pasca bencana	2.959.035.000	2.710.929.000	91.62	Jumlah bencana pasca bencana	11 titik	9 titik
	Rehabilitasi Sarana Prasaran pasca bencana	1.522.747.000	1.360.782.000	89.36	Jumlah sarana pasca bencana	11 titik	9 titik
	Dana bantuan kegiatan, rehabilitasi rekontruksi pasca bencana	10.107.387.000	9.991.570.500	98.85			
	DED Sungai bawah tanah kawasan KARST di kec. panggung rejo dan kec. Wonotirto						
8	Program optimalisasi teknologi infomasi						
	Publikasi informasi kebencanaan	30.150.000	25.500.000	84.58			
	Jumlah I	19.398.762.000	18.394.685.482	94.82			

Sumber: BPBD Kabupaten Blitar, 2016

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Sesuai dengan perjanjian kinerja dari target yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2016 mencapai target 94,82 % (Anggaran kegiatan Rp 19.398.762.000,00 terealisasi Rp. 18.394.685.482,00)
2. Bantuan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp. 10.107.387.000,00 yang diterima pada tanggal 24 November 2016 pada akhir tahun anggaran terealisasi Rp. 9.991.570.500,00 (98,85%).

4.2 Rencana Kedepan

1. Rencana kerja tahunan akan disusun sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.
2. Akan diupayakan percepatan pencapaian target yang lebih objektif sehingga dapatv dicapai secara maksimal.
3. Penanggulangan bencana lebih diupayakan pada kegiatan pengurangan risiko bencana.